



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL ISTIQOMAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 278490

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.905.220.000

1. Tanah Seluas 4610 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 185.960.000
2. Tanah Seluas 4355 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 165.800.000
3. Tanah Seluas 3985 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 145.460.000
4. Tanah Seluas 4625 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 172.500.000
5. Tanah Seluas 633 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/126 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 220.500.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/69.57 m2 di KAB / KOTA KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/180 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 908.000.000

1. MOBIL, JEPP WRANGLER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI

Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 220.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 219.181.178

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.252.401.178

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.252.401.178

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.